

## **HONGKONG MENUJU "SATU NEGARA DUA SISTEM"**

Oleh : Humphrey Wangke

### **Abstract**

*Based on the Britain-China Agreement 1984, China will regain its sovereignty on the entire of Hongkong on 1<sup>st</sup> July 1997. The policy introduces the implementation of China's "one state two system" concept. In fact, there are indications China will change Hongkong become an authoritarian capitalism region, which greatly restrict Hongkong's traditional freedom, such as freedom of the press, freedom of speech, etc.*

### **A. PENDAHULUAN**

Setelah mengalami masa kolonisasi Inggris selama hampir 150 tahun, Hongkong akhirnya kembali ke pangkuan pemerintah Cina pada tanggal 1 Juli 1997. Kembalinya Hongkong ke tangan pemerintah Cina dimungkinkan karena kontrak 99 tahun yang ditandatangani Inggris dan Cina atas wilayah Hongkong berakhir pada tanggal tersebut. Proses pengembalian Hongkong ternyata tidaklah semudah seperti yang dibayangkan, jika kontrak berakhir maka saat itu pula Hongkong harus dikembalikan ke pemilik asalnya. Inggris dan Cina memerlukan waktu perundingan sampai 2 tahun untuk memperoleh ketegasan mengenai berakhirnya masa kontrak Hongkong.

Berbagai predikat yang menyatu dengan Hongkong-lah yang menjadi masalah mengapa kembalinya Hongkong ke Cina menjadi pembicaraan ramai. Dunia mengkhawatirkan apakah Hongkong akan tetap dibiarkan menjadi bandar niaga terkemuka dunia setelah Cina mengambil kembali Hongkong. Dunia mencemaskan apakah investasi yang sangat besar di sana tetap aman, dan apakah Hongkong tidak mengalami masa suram ? Karena bagaimanapun juga jaringan perdagangan, bisnis, dan keuangan Hongkong telah

menyatu dengan mekanisme perdagangan, keuangan dan bisnis dunia. Sehingga kesalahan pada jaringan-jaringan di Hongkong dengan sendirinya akan mempengaruhi seluruh jaringan ekonomi dunia.

Antisipasi terhadap kekuatiran-kekuatiran seperti itu dilakukan oleh pemimpin Cina Deng Xiaoping dengan cara melontarkan gagasannya mengenai konsep "satu negara dua sistem". Tetapi banyak pihak menilai gagasan seperti ini sebagai sangat pragmatis sebab pada dasarnya inti dari gagasan ini adalah bagaimana Hongkong bisa kembali ke pangkuan Cina tanpa harus menghapus sistem kapitalisme yang berlaku di sana. Tetapi seperti yang ditulis oleh Reginald Dale<sup>1)</sup>, masalahnya bukan terletak pada apakah pemimpin Cina mengerti kapitalisme, tetapi lebih kepada apakah pemimpin Cina mengerti bahwa mereka tidak memahami kapitalisme. Oleh karena itu di dalam makalah ini diuraikan berbagai kebijakan Cina dalam mempraktekkan konsep "satu negara dua sistem".

## **B. PERSETUJUAN INGGRIS-CINA 1984**

Bila dilihat dari sejarahnya, Hongkong mulai dikuasai Inggris sebagai akibat Perang Candu pertama tahun 1839-1840. Penguasaan atas Pulau Hongkong dikukuhkan dalam Perjanjian Nanking 1882, antara Inggris dengan Cina. Kemudian pada tahun 1896 Inggris diperbolehkan menyewa suatu kawasan yang disebut New Territories selama 99 tahun tanpa uang sewa sepersenpun. Ketiga daerah ini, yaitu Pulau Hongkong, Kowloon, dan New Territories ditambah pulau-pulau kecil lainnya di daerah lepas pantai, membentuk Hongkong seperti saat ini.

Hongkong yang kini menjadi salah pusat keuangan terpenting di Asia seolah tidak percaya bahwa pada saatnya nanti wilayah itu harus kembali ke pemilik aslinya yaitu RRC. Rasa takut dan cemas akan masa depan demokrasi dan kebebasan yang selama ini mereka nikmati menghinggapi hampir semua penduduk Hongkong. Inggris yang selama ini menjadi penyewa wilayah makmur itupun masih menginginkan untuk memperpanjang kontrak dengan Cina.

Akan tetapi menjelang berakhirnya masa sewa tahun 1997, hari depan Hongkong menjadi jelas pada tanggal 6 Juli 1982. Ketika itu nasib Hongkong diumumkan di Beijing. Adalah Pang Zhen, Wakil

---

1) Keraguan dunia atas kemampuan RRC dalam memahami kapitalisme Barat bisa kita ikuti melalui tulisan Reginald Dale dalam "Can China See Why Hongkong Works", *International Herald Tribune*, 11 Februari 1997

Ketua Partai Komunis RRC, pada saat berbicara di depan Sidang *Standing Committee* Kongres Rakyat Nasional (Parlemen) Cina mengatakan "Hongkong, Macao, dan Taiwan akan menjadi wilayah administrasi khusus di bawah pimpinan RRC". Dengan demikian setelah puluhan tahun dalam keadaan tidak menentu nasib Hongkong yang makmur ini menjadi jelas : RRC menghendaki wilayah itu kembali.

Proses pengembalian Hongkong dimulai tahun 1982 ketika Inggris dan Cina mulai berunding mengenai masa depan koloni itu. Setelah melalui perundingan yang alot selama dua tahun yang terdiri dari 22 tahapan perundingan akhirnya tercapai kesepakatan dalam bentuk deklarasi. Deklarasi bersama Inggris-Cina tentang pengembalian Hongkong dari Inggris kepada Cina pada tanggal 1 Juli 1997 ditandatangani tanggal 26 September 1984 di Beijing.<sup>2)</sup> Peristiwa ini merupakan puncak dari upaya Cina untuk memperoleh kembali Hongkong, setelah Inggris menguasainya selama hampir 142 tahun. Keberhasilan ini sekaligus merupakan kebanggaan bagi RRC karena ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa negara komunis juga mampu mengambil kembali wilayahnya tanpa kekerasan.

Dengan demikian, Inggris setuju untuk mengembalikan kawasan Hongkong yang terdiri dari Pulau Hongkong, Semenanjung Kowloon, dan New Territories yang dikuasainya berdasarkan persetujuan yang dibuat setelah perang candu tahun 1842 dan 1860. Bagi penduduk Hongkong dan Inggris, yang paling pokok dari isi perjanjian itu adalah janji Cina bahwa Hongkong yang berpenduduk hampir 7 juta jiwa akan mempunyai pemerintahan tersendiri dan memperoleh kebebasan serta boleh mempertahankan sistem sosial ekonominya yang sekarang berlaku selama 50 tahun setelah 1997. Dalam soal ini pemimpin Cina mendiang Deng Xiaoping mengatakan, RRC akan mempunyai dua sistem dalam wilayahnya yaitu komunis dan kapitalis.<sup>3)</sup>

Berdasarkan isi deklarasi tersebut, Hongkong akan menjadi suatu wilayah administrasi khusus Cina yang sangat otonom disebut *Special Administrative Region* (SAR) mulai 1 Juli 1997. Dalam perjanjian disepakati bahwa Hongkong akan tetap mempunyai sistem sosial dan ekonomi seperti saat ini selama 50 tahun setelah 1997. Dengan demikian, kebijakan dan sistem sosial yang berlaku di RRC tidak berlaku di Hongkong. Karenanya, posisi Hongkong sebagai

---

2) Kompas, 27 September 1984

3) Kompas, 27 Juli 1984

pelabuhan bebas, wilayah pabean tersendiri, dan pusat keuangan tetap dipertahankan bersama kebebasan di bidang keuangan. Pemerintah Cina hanya akan bertanggung jawab atas masalah pertahanan dan luar negeri Hongkong.

Sementara itu bagi 2,3 juta penduduk Hongkong yang memegang paspor Inggris praktis akan kehilangan status ini sebagai penduduk wilayah yang tergantung kepada Inggris setelah 1 juli 1997. Akan tetapi kepada mereka tetap diberikan status yang wajar yang tidak memungkinkan mereka patuh kepada Inggris, tetapi yang memungkinkan mereka menggunakan paspor yang dikeluarkan oleh Inggris.

Dalam persetujuan itu sistem hukum dan pengadilan Hongkong, termasuk hukum adatnya pada dasarnya tidak berubah. Tetapi suatu pengadilan kasasi akan diciptakan di Hongkong. Para pemimpin Hongkong akan ditunjuk oleh RRC berdasarkan hasil pemilihan umum atau konsultasi yang diadakan di Hongkong. Dalam bidang ekonomi, Hongkong akan mempunyai otonomi dalam bidang ekonomi, keuangan dan moneter. Tidak akan ada pengawasan devisa oleh pemerintah Cina dan dolar Hongkong akan dibiarkan mengambang hanya saja gambar Ratu Elizabeth harus hilang. Para investor akan bebas menanam dan menarik modalnya dari Hongkong. Disebutkan pula Hongkong bebas menentukan kebijaksanaan pelayaran atau mengadakan hubungan dengan negara lain. Bahkan Hongkong juga bisa ikut dalam badan internasional seperti GATT.

Pada awal perundingan Inggris menghendaki agar persetujuan yang hanya berbentuk deklarasi itu merupakan persetujuan internasional yang mengikat secara hukum. Maksudnya agar Cina mempunyai kewajiban hukum dan moral untuk mematuhi isi perjanjian.<sup>4)</sup> Tetapi Cina selalu beranggapan bahwa Hongkong merupakan bagian integral dari RRC dan menolak bentuk perjanjian seperti yang dikehendaki Inggris. Akibatnya adalah penduduk Hongkong harus menghadapi resiko berada dalam keadaan tidak berdaya setelah tahun 1997 jika RRC tidak menghormati dan memenuhi persetujuan itu. Satu-satunya jaminan bagi penduduk Hongkong bahwa Cina akan mematuhi perjanjian itu adalah bahwa Cina akan memenuhi perjanjian yang ditandatangani demi membujuk Taiwan agar mengikuti jejak Hongkong kembali ke wilayah RRC.<sup>5)</sup> Dengan tetap memenuhi janji mempertahankan stabilitas dan

4) Inggris merasa bahwa persetujuan yang bergantung kepada konstitusi Cina akan sangat rapuh karena konstitusi Cina telah beberapa kali direvisi sejak tahun 1949. Untuk lengkapnya lihat William H. Overholt, "Hongkong After the Chinese Agreement", *Asian Perspective*, Vol. 9, No. 2, hal. 258

5) Kompas, 23 September 1984

kemakmuran Hongkong setelah tahun 1997, Cina dapat memberikan kesan baik kepada rakyat Taiwan.

Bagaimanapun juga secara politis Cina tidak bisa bertindak salah dalam soal Hongkong. Sebab hal itu akan menyulitkan Cina untuk memperoleh kembali Taiwan secara damai melalui perundingan. Hal ini bisa berbentuk campur tangan RRC dalam pemerintahan Hongkong sebelum 1 Juli 1997. Cina harus mampu membuktikan bahwa mereka juga dapat mengendalikan Hongkong lebih baik daripada yang sudah dilakukan Inggris di wilayah itu.<sup>6)</sup> Disamping itu keberadaan Hongkong sebagai pusat keuangan dan perdagangan serta bisnis di Asia juga akan sangat menguntungkan Cina sebab akan menjadi daya tarik kuat investor asing untuk masuk ke Cina. Karenanya ada yang berpendapat bahwa persetujuan tersebut tidak bisa dinilai dalam konteks hukum tetapi lebih tepat dipandang dari sisi politik dan psikologi.<sup>7)</sup>

### C. TERGANTUNG KOMITMEN CINA

Penduduk Hongkong umumnya masih diliputi rasa ketidakpastian dan keraguan akan masa depan mereka terutama bila telah berbicara tentang kebebasan. Sehingga kesan yang timbul adalah mereka bersikap tidak peduli akan masa depannya, yang terpenting bagi mereka adalah perekonomian tetap berjalan sebagaimana mestinya<sup>8)</sup>. Ketidakpedulian seperti itu akhirnya menyebabkan mereka bersikap mendua, di satu sisi mereka tidak ingin terus menerus menjadi koloni Inggris, tetapi di sisi lainnya mereka juga ingin agar Inggris tetap berada di Hongkong kalau wilayah itu sudah dikembalikan ke RRC. Entah dalam kapasitas sebagai apa. Mereka berharap Inggris tetap hadir di Hongkong setelah tahun 1997. Karena itu penduduk Hongkong seperti *shock* ketika mengetahui bahwa Inggris berniat meninggalkan Hongkong.

Berbeda dengan penduduk Hongkong yang masih merasa tidak pasti, Inggris justru jauh sebelumnya telah mengantisipasi bahwa Hongkong harus dikembalikan ke RRC. Hal ini bisa dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang baru tahun 1982 tentang

---

6) Lihat Thomas L. Friedman, "Beijing Needs to Understand What Makes Hongkong Special", *International Herald Tribune*, 16 Desember 1996

7) George L. Hicks, "Hongkong Countdown", *Publishers Cooperation*, Hongkong, hal. 54

8) Kompas, 15 Maret 1997

kewarganegaraan (*Nationality Act 1982*). Didalamnya ada ketentuan bahwa para pemegang paspor Inggris yang bukan warganegara Inggris tidak bisa tinggal di negeri itu.

Sedangkan sikap RRC terhadap Hongkong bisa dilihat dari dua kejadian. Pertama ketika menerima delegasi pengusaha Hongkong, Deng Xiaoping meyakinkan mereka bahwa RRC menghendaki Hongkong tetap makmur dengan bisnis yang kuat. Tetapi ketika menerima delegasi *Legco* (*Legislative Committee*) Hongkong dari unsur swasta yang menyuarakan kekuatiran penduduk Hongkong, Deng dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu ada kekuatiran seperti itu. Secara terus terang Deng Xiaoping mengatakan bahwa ketiga orang itu diterimanya sebagai pribadi-pribadi yang mewakili penduduk Hongkong. Dengan kata lain bisa diartikan bahwa dalam merundingkan masalah Hongkong, pemerintah RRC hanya berurusan dengan Inggris, bukan dengan penduduk Hongkong. Penduduk Hongkong hanya dipandang sebagai bagian integral dari penduduk RRC yang kebetulan tinggal di wilayah yang disewa Inggris.

Penduduk Hongkong melihat Inggris telah melakukan kesalahan dalam proses perundingan sebab baru tahun 1982 mempermasalahkan masa depan Hongkong. Mereka menyalahkan Inggris karena tidak lebih dini melakukan hal itu sehingga bisa lebih lama mempersiapkan penduduk Hongkong menghadapi masa transisi. Penduduk Hongkong juga melihat kesalahan Inggris lainnya yaitu ketika mengadakan perundingan dengan pemerintah RRC, Inggris dianggap terlalu cepat menyerah dan menyetujui akhir September 1984 sebagai batas akhir perundingan karena adanya ancaman dari RRC yang akan mengumumkan sendiri rencananya tentang Hongkong kalau batas waktu itu dilalui. Kesalahan demikian membuat Inggris tidak leluasa melakukan manuver selama melakukan perundingan.

Selain ingin secepatnya meninggalkan Hongkong, Inggris memang berada dalam posisi lemah karena Hongkong adalah hak Cina. Apa yang dilakukan Inggris kemudian adalah memperoleh konsesi Cina untuk rakyat Hongkong. Banyak atau sedikit konsesi itu Inggris akan tetap meninggalkan Hongkong. Karenanya kesepakatan yang bisa dicapai kedua negara dalam perundingan itu hanyalah berbentuk deklarasi yang biasanya memiliki daya ikat yang sangat lemah. Sehingga bila Cina ingin melanggar kesepakatan, mudah saja hal itu dilakukan. Misalnya bila Partai Komunis Cina mempunyai pendapat yang berbeda, maka Inggris dan juga penduduk Hongkong tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu diketahui bahwa di Cina, partai Komunis adalah yang paling berkuasa dan

menjadi penentu kebijakan negara sementara pemerintah adalah pelaksana.

Karenanya menarik untuk dicermati sejauh mana Cina akan memegang teguh komitmennya terhadap Hongkong apalagi setelah pemimpin mereka yang paling dihormati, Deng Xiaoping, meninggal dunia. Karena baik Inggris maupun penduduk Hongkong, terutama kelompok pro-demokrasi, tidak mempunyai kekuatan pemaksa untuk menekan Cina mematuhi deklarasi itu.

#### D. KEGAGALAN PROGRAM REFORMASI INGGRIS

Ketidaksiapan yang menghinggapi perasaan setiap penduduk Hongkong dalam menghadapi masa depannya bisa dilihat dari proses pemilihan umum yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Chris Patten tahun 1995. Pemilu ini diikuti oleh beberapa partai yang telah terpolarisasi ke dalam dua kubu yaitu kelompok pro-demokrasi dan kelompok pro-Beijing.

Kelompok pro-demokrasi akhirnya memenangkan pemilihan umum setelah pemimpin Partai Demokrasi Hongkong, Martin Lee, mengumumkan kemenangannya. Hasil perhitungan suara menunjukkan Martin Lee memperoleh 37.459 suara, sedangkan lawannya, Choy So-yuk yang pro Beijing, hanya memperoleh 14.119 suara. Dengan kemenangan ini berarti Martin Lee berhak untuk membentuk badan perwakilan yang untuk pertama kalinya dan mungkin juga yang terakhir, dipilih secara langsung.

Dalam sistem pemilihan ini, hanya 20 dari 60 kursi Dewan Perwakilan yang dikembalikan pada pemilihan secara langsung oleh para pemilih dari distrik pemilihan geografis, sedangkan 30 kursi lainnya untuk distrik-distrik pekerjaan. Para anggota Dewan Perwakilan lokal dikenakan tanggung jawab mengembalikan 10 kursi dari komite pemilu.

Hasil pemilihan Dewan Legislatif (*Legco*) Hongkong paling tidak memberikan gambaran mengenai dua hal. Pertama, rencana Gubernur Hongkong Chris Patten untuk mendemokraskan Hongkong sebelum dikembalikan ke Cina tahun 1997, hampir berhasil. Kedua, hasil pemilu Hongkong ini telah mengejutkan para pemimpin Cina karena dimenangkan oleh Partai Demokrasi Hongkong pimpinan Martin Lee Chung-ming yang di Beijing dianggap sebagai kelompok subversif setelah partai ini mengecam habis Cina yang membantai ribuan orang di lapangan Tiananmen tahun 1989.<sup>9)</sup>

Kelompok pro-demokrasi menganut garis keras terhadap Beijing semata-mata untuk menjamin tingkat otonomi tinggi seperti yang dijanjikan sesudah tahun 1997, sedangkan kelompok pro Beijing menolak konfrontasi dengan pemimpin Cina. Cina yang terkejut dengan hasil pemilu itu, segera menolak merestui hasil pemilihan itu seperti yang dikatakan oleh PM Li Peng : "Sikap Cina sudah jelas. Kami tidak akan mengakui apapun yang bertentangan dengan deklarasi kerja sama atau dengan UUD Cina".<sup>10)</sup> Yang dimaksud Li Peng adalah Perjanjian Cina-Inggris tahun 1984 mengenai pengembalian Hongkong kedalam kekuasaan Cina, serta Hukum Dasar (*Basic Law*) yang merupakan undang-undang mini yang akan mengatur fungsi Hongkong sebagai bagian dari otonomi Cina.

Ironi bagi Hongkong yang telah selama 142 tahun dibawah kekuasaan Inggris adalah "tidak adanya pendidikan politik" yang memadai yang diberikan Inggris kepada penduduk Hongkong. Sehingga tingkat kepedulian penduduk Hongkong terhadap politik atau demokrasi di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai pusat keuangan dunia, tidaklah sebesar seperti yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari respon penduduk Hongkong terhadap pemilu itu sendiri. Data statistik berikut ini mungkin bisa dipakai untuk memperkuat asumsi diatas ini. Penduduk Hongkong dewasa ini tercatat 7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut hanya 920.756 pemilih saja yang menggunakan hak pilihnya dengan memasukkan suaranya ke dalam kotak pemilu yang terakhir dilaksanakan di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Jumlah itu hanya mewakili 35,79 persen dari total penduduk yang mempunyai hak pilih, atau 3,36 persen lebih rendah dibandingkan pemilu terakhir yang dilaksanakan tahun 1991.

Boleh jadi sikap apatisme penduduk Hongkong terhadap reformasi politik Inggris, seperti pemilu diatas, dilatarbelakangi oleh kuatnya rasa ketidakpastian akan masa depan mereka. Tetapi bagi Gubernur Chris Patten kondisi demikian tentu tidak memuaskan, karena ternyata kurang dari 1 juta orang yang aktif dalam memilih dari 7 juta penduduk Hongkong. Karenanya tidak jelas benar apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Chris Patten dengan memprogramkan demokrasi dan pemilu di Hongkong yang sempat menegangkan hubungan Cina-Inggris. Gubernur Chris Patten nampaknya kurang memahami karakter bangsa Cina. Ia berpikir bahwa dengan melaksanakan pemilu ia dapat memaksa Cina menerima rencana reformasi politiknya,<sup>11)</sup> kendati sejak awal Cina

10) Kompas, 19 September 1995

11) Baca Frank Ching, "Patten : A Mixed Performance", *Far Eastern Economic Review*, 9 Januari 1997.



telah mengancam untuk tidak menerima semua bentuk institusi politik yang diciptakannya begitu Hongkong kembali ke Cina.

Di samping itu rencana Inggris untuk memperbaharui sistem pemerintahan Hongkong datangnya sudah sangat terlambat karena baru diumumkan tahun 1992 melalui penunjukkan Chris Patten sebagai Gubernur Jenderal Hongkong. Di dalam rencana itu, sejumlah reformasi akan diperkenalkan Inggris antara tahun 1992-1995 untuk memperkuat otonomi dan demokrasi model Barat di Hongkong. Yang terpenting dari reformasi itu adalah mengadakan pemilihan umum yang mengubah sistem dewan legislatif yang semula dipilih secara partial menjadi lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Harapannya agar lembaga perwakilan yang telah dipilih sebelum tahun 1997 tetap bertahan hingga berakhirnya masa tugas sehingga menciptakan preseden bisa dipilih kembali setelah tahun 1997. Tujuannya adalah untuk mempertegas keberadaan lembaga otonomi yang dijanjikan oleh Basic Law yaitu hak dari semua penduduk Hongkong untuk memilih anggota legislatif secara bebas. Basic Law disahkan Cina tahun 1992 sebagai konstitusi Hongkong setelah 1 Juli 1997.

Tetapi Cina dengan tegas menolak apapun hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara sepihak oleh Inggris tersebut. Cina bukan saja tidak mengakui hasil pemilu tersebut, tetapi semua anggota Legco yang terpilih tidak akan dibiarkan menjalani masa tugas sampai 4 tahun penuh dan semua bentuk pemerintahan harus disesuaikan dengan Basic Law.<sup>12)</sup> Kehidupan demokrasi yang ingin dipraktekkan Inggris di Hongkong ternyata tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Karena disamping penduduk Hongkong kurang antusias menyambut pemilihan itu, pemerintah Cina sendiri tidak ingin menghormati apapun hasil pemilihan itu.

Hasil pemilu Hongkong ini justru menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian tentang partisipasi politik kelas menengah Asia yang dilakukan oleh Institute of Ethnology, Academia Sinica Taiwan. Proyek penelitian ini dilaksanakan serentak di empat negara masing-masing Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Hasil penelitian yang disebut sebagai Proyek SEAMC (*Southeast Asia Middle Classes*) menunjukkan bahwa meskipun kelas menengah Asia cukup aktif memberikan suara dalam pemilu, namun pada dasarnya mereka memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah.<sup>13)</sup> Menurut hasil penelitian itu lebih lanjut, penyebabnya adalah

---

12) Suzanne Peper, "Institution-Building and Citizenship Between Two Sovereigns", *Asian Survey*, Vol. XXXVI, no. 1, Januari 1996.

13) Kompas 30 Januari 1997

kebanyakan kelas menengah Asia sebenarnya kaum borjuis, cenderung konservatif, mendukung kebijakan penguasa, lebih suka mempertahankan status quo, dan mereka berpikir bahwa masyarakatnya belum siap untuk berdemokrasi. Pertanyaannya, akankah kelas menengah di Hongkong tetap bersikap pasif terhadap kehadiran Cina di Hongkong ?

#### E. AUTHORITARIAN CAPITALISM?

— Persetujuan yang tercapai pada bulan September 1984 setidaknya telah menghapus kemungkinan timbulnya krisis keuangan dan kekerasan. Persetujuan ini telah berhasil meyakinkan peranan Hongkong sebagai pusat keuangan di Asia. Persetujuan itu juga telah berhasil meyakinkan bahwa Hongkong tetap sebagai pintu gerbang keuangan dan perdagangan penting dalam memperluas pangsa pasar ke Cina daratan dan itu berarti akan tetap menjadikan Hongkong sebagai pusat produksi manufaktur dan turisme yang utama.

Untuk mencapai persetujuan seperti itu ternyata diperlukan suatu kecakapan negosiasi dalam sejarah modern diplomasi. Karena seperti yang dikatakan oleh William Overholt<sup>14)</sup>, untuk mencapai keberhasilan ini baik Inggris maupun Cina harus mengatasi terlebih dahulu perbedaan kultural yang sangat besar, mengesampingkan rasa bangga yang dimiliki oleh pemimpin seperti Margareth Thatcher ataupun Deng Xiaoping, mengajari para pemimpin Cina komunis tentang cara kerja sistem ekonomi *laissez faire* dan menekan reaksi Cina tentang cara kerja *laissez faire*. Semua hambatan ini bisa teratasi karena Deng Xiaoping ingin secepatnya memulihkan teritorial Cina, sama seperti agar program reformasi ekonominya berjalan lancar. Sedangkan bagi Inggris karena sikap profesional dan sabar dalam bernegosiasi maka hasil yang sudah dicapai itu merupakan kemungkinan terbaik karena mereka mengakui sendiri bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain terhadap kedaulatan Cina.

Kredibilitas dari perjanjian itu diperkuat oleh tekad pemimpin Cina untuk maju bersama dengan perkembangan ekonomi dan rencana reformasi dimana Hongkong akan memainkan peranan penting, dan oleh kesanggupan Cina menandatangani persetujuan internasional formal yang lebih detil daripada yang biasa dilakukan Cina selama ini. Lebih dari itu Cina akan memanfaatkan Hongkong - setelah diperoleh kembali - sebagai model yang bisa diterapkan terhadap

14) William Overholt, *Ibid*, hal. 265

Taiwan kelak. Cina optimis, reunifikasi Taiwan dengan Cina bukan sekedar mimpi bagi mereka.<sup>15)</sup> Dengan menggunakan keberhasilan persetujuan Hongkong kepada Taiwan bahwa formula "satu negara dua sistem" yang dipraktekkan Cina dapat bekerja bagi keuntungan kawasan otonom kantong kapitals di bawah kedaulatan Cina.

Dengan demikian Hongkong akan menjadi bagian dari sebuah negara komunis Cina yang boleh dibilang tidak demokratis karena tidak pernah mempraktekkan "kebebasan" bagi rakyatnya. Dan reaksi PM Li Peng terhadap pemilu yang diadakan oleh Gubernur Chris Patten bisa mengindikasikan bahwa Cina tidak akan mentolerir lembaga-lembaga politik seperti Dewan Legislatif atau Dewan Eksekutif yang merupakan produk dari pemerintah kolonial Inggris. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan pers, pemilu yang dilaksanakan secara bebas, ataupun bentuk-bentuk lembaga politik yang anti-pemerintah. Komentar Deng Xiaoping tentang arti kebebasan yang selama ini dinikmati oleh rakyat Hongkong, bisa mempertegas hal itu. Katanya : "*there would be no room for a Western-style democracy in Hongkong after China resume control in 1997.....capitalist practices could continue for 100 years*".<sup>16)</sup>

Demikian pula dengan konsep "rakyat Hongkong akan mengatur sendiri wilayahnya" dengan tingkat otonomi yang tinggi, diragukan efektifitasnya. Masalahnya, eksistensi pemerintahan Cina sendiri selama ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang sangat terpusat, sehingga konsep pemerintahan otonomi jarang ada yang bisa berkembang di sana. Cina memang diketahui mengembangkan sejumlah daerah khusus seperti Shenzhen, Guangzhou ataupun Xiamen, tetapi tanpa dibarengi dengan tingkat otonomi yang tinggi. Di daerah khusus tersebut Partai Komunis tetap memainkan peran yang dominan dalam kehidupan kemasyarakatan.

Hal ini bukan berarti Cina tidak akan menampung Hongkong ke dalam sistem komunis. Tetapi lebih dari itu, "*What China favours is a kind of authoritarian capitalism on the model of Taiwan or Singapore*", kata ekonom Hongkong, Dr. Y.C. Jao.<sup>17)</sup> Gejalanya mulai nampak ketika dalam suatu pertemuan tertutup di kota Shenzhen tanggal 21 Desember 1995, pemerintah Cina telah mengangkat Dewan Legislatif

---

15) Republika, 1 Mei 1993

16) Ahmed Dalvean, "Hongkong's Political and Social Culture : Some Continuing Problems of Difinition and Perception, and theree Repercussions in a Transitional Polity", *Asian Perspective*, Vol. 12, No. 2, hal. 193

17) George Hicks, *Ibid*, hal. 61

Hongkong dengan Rita Fan sebagai ketuanya.<sup>18)</sup> Parlemen bayangan ini akan menggantikan fungsi parlemen yang telah dipilih secara demokratis tahun 1995 tepat pada saat Cina mengambil alih kekuasaan di Hongkong 1 Juli 1997. Parlemen bentukan Cina ini hanya akan bertugas selama 1 tahun sampai tahun 1998, yaitu saat berakhirnya masa tugas parlemen hasil pemilihan umum secara bebas. Kendati singkat tetapi justru pada saat itulah parlemen bentukan Cina mempunyai tugas yang sangat penting bagi masa depan kebebasan sipil di Hongkong yaitu mengesahkan UU Anti-subversi dan UU Pemilu yang baru.<sup>19)</sup>

Praktis saat ini Hongkong mempunyai 2 parlemen : yang satu dipilih secara bebas oleh rakyat sedangkan yang lainnya dibentuk dan diangkat oleh penguasa Cina untuk menegaskan kedaulatan Cina atas Hongkong. Dibawah rezim yang sekarang, Hongkong mempunyai komitmen kuat terhadap institusi-institusi demokrasi dan HAM, yang mendorong rakyat melakukan pemilihan umum secara bebas dan jujur. Namun dengan adanya badan legislatif bentukan Cina, maka jelas lembaga baru bentukan Cina itu hanya akan menjadi "stempel karet" bagi Cina. Dengan menggusur pemimpin-pemimpin Hongkong yang sah dan menggantinya dengan wakil-wakil pilihan mereka maka rakyat Hongkong akan dengan mudah dikendalikannya.<sup>20)</sup>

Masa depan kebebasan sipil di Hongkong kini berada dalam taruhan sebab Cina sedang mempertimbangkan untuk mencabut tidak kurang 25 UU dari 624 UU yang sedang berlaku di Hongkong. Di antara UU yang akan dicabut itu adalah UU HAM Hongkong (*Hongkong's Bill of Rights Ordinance*). UU ini sangat sensitif karena merupakan payung bagi UU lainnya dalam menjamin kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Cina berusaha konsisten dengan sikap awalnya untuk tidak membiarkan semua perangkat atau lembaga politik produk kolonial Inggris untuk bertahan di Hongkong setelah 1 Juli 1997

Cina terus bergerak cepat dalam mempersiapkan proses pengembalian Hongkong. Melalui Dewan Legislatif tersebut Cina telah menetapkan seorang pengusaha kaya yang pro-Beijing, Tung Chee-Hwa, sebagai pemimpin Hongkong pasca 1 Juli 1997. Banyak pihak yang mengecam cara pemilihan Tung Chee-Hwa sebagai

---

18) International Herald Tribune, 27 Januari 1997

19) David Newman, Hongkong's Undemocratic Future, Asian Wall Street Journal, 20-21 Desember 1996

20) Media Indonesia, 26 Desember 1996.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dale, Reginald, "Can China See Why Hong Kong Works ?", *International Herald Tribune*, 11 Februari 1997
- Dalvean, Ahmed, "Hong Kong's Political and Social Culture : Some Continuing Problems of Definition and Perception, and their Repercussions in a Transitional Polity", *Asian Perspective*, Vol. 12, No. 2, Fall-Winter 1988
- Friedman, Thomas L., "Beijing Needs to Understand What makes Hong Kong Special", *International Herald Tribune*, 16 Desember 1996
- Hicks, George L., "Hongkong Countdown", *Writers & Publishers Cooperative*, Hongkong, 1989
- Holmes, Kim R., "What's Making Asia Grow ? Freedom", *Asian Wall Street Journal*, 28 Nopember 1996
- Lee, Martin, "Can Tung Transcend the System ?", *Asian Wall Street Journal*, 12 Desember 1996
- Newman, David, "Hong Kong's Undemocratic Future", *Asian Wall Street Journal*, 20-21 Desember 1996
- Overholt, William H., "Hongkong After the Chinese-British Agreement", *Asian Perspective*, Vol. 9, No. 2, Fall-Winter 1985
- Pepper, Suzanne, "Hongkong in 1995 Institution-Building and Citizenship Between Two Sovereigns", *Asian Survey*, Vol. XXXVI, No. 1, January 1996
- Robert Elegant, "Hong Kong Freedom ? Beijing Isn't Inte- rested", *International Herald Tribune*, 20 Januari 1997
- Woronoff, Jon, "The Asian Tigers", *Lotus Press*, Tokyo, 1986

#####